



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN  
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Juncto Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 22);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 19, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

## Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 22), huruf B diubah, sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang di Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 11 November 2021

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 11 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 112 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

RINCIAN JENIS PELAYANAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

A. PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Rekomendasi pembuatan dan Herregistrasi segala bentuk perizinan selain yang termuat dalam pelayanan PATEN.
2. Rekomendasi pelayanan administrasi Pencatatan Sipil.
3. Rekomendasi Pindah Antar Daerah.
4. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan kecamatan.
5. Penerbitan Surat Keterangan :
  - a. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan.
  - b. Surat Keterangan Ahli Waris dan Legalisasinya
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
  - d. Surat Keterangan lainnya.

B. PELAYANAN PERIZINAN

Penerbitan Izin Pendirian PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak) dan Non Formal (Kelompok Bermain, Satuan Paud Sejenis, Tempat Penitipan Anak, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH